BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor maritim memiliki banyak kegiatan yang berlangsung setiap waktu, salah satunya yaitu kegiatan pada sektor migas berupa operasional kapal-kapal pendukung kegiatan lepas pantai. Kegiatan lepas pantai berupa proses mekanis untuk mengebor lubang atau sumur dengan arah masuk menuju dasar laut. Proses ini umumnya dilakukan untuk eksplorasi dan penambangan minyak bumi dan gas alam yang berada pada formasi bebatuan di bawah dasar laut. Selama beberapa tahun terakhir, industri minyak dan gas lepas pantai telah berkembang pesat, yang menyebabkan meningkatnya permintaan akan kapal pendukung lepas pantai karena dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi tersebut tentu memerlukan berbagai infrastruktur pendukung kegiatan operasional itu sendiri maupun proses pembuatan anjungan lepas pantai. Dalam hal ini peran adanya kapal-kapal pendukung kegiatan lepas pantai sangat penting. Kapal kegiatan lepas pantai (*offshore*) yaitu kapal khusus untuk kegiatan eksplorasi minyak dan konstruksi di laut lepas. Kapal *offshore* juga digunakan dalam proses konstruksi di laut lepas serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah perairan yang lainnya. Selain itu, kapal *offshore* juga berfungsi sebagai transportasi awak kapal serta melakukan kegiatan pasokan ke area operasional di laut lepas. Sebagian besar jenis kapal *offshore* memiliki desain khusus dan fitur yang membuat kapal dapat beroperasi secara efektif pada wilayah laut lepas.

Kapal-kapal dalam kegiatan lepas pantai mempunyai potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, baik dalam skala nasional ataupun internasional karena sector migas merupakan sektor penunjang perekonomian. Bagi perusahaan pelayaran, kapal sebagai alat utama dalam mendapatkan penghasilan karena salah satu tujuan perusahaan pelayaran adalah memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional kapal sebagai hasil dari jasa angkutan laut. Pendapatan ataupun biaya operasional sangat dipengaruhi oleh perawatan kapal yang dilaksanakan dengan

baik. Kapal sebagai alat transportasi pada aktivitas penambangan migas dalam pengoperasiannya akan mengalami kerusakan karena berbagai macam penyebab baik faktor alam yang menyebabkan kerusakan pada kondisi konstruksi, serta dapat disebabkan oleh lingkungan, serta kesalahan manusia. Untuk menjaga operasional kapal pada kondisi optimal dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh *class* atau biro klasifikasi yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) maka terdapat aturan tentang reparasi serta perawatan pada kapal secara berkala atau disebut dengan *docking* (Rahman & Supomo, 2012).

Docking kapal merupakan sebuah tempat di perairan yang memiliki fungsi untuk melakukan proses pembangunan kapal, perbaikan kapal, serta pemeliharaan kapal. *Docking* merupakan proses penggeseran kapal dari perairan atau wilayah laut ke atas dermaga atau dok yang berupa sebuah tempat khusus yang dilengkapi dengan peralatan yang berfungsi untuk mendukung proses pembuatan, perbaikan, dan perawatan kapal. Kegiatan *docking* kapal berupa kegiatan pemeliharaan kapal seperti pemeriksaan, perbaikan kerusakan, pengecatan badan kapal, dan pembersihan badan kapal yang berada di bawah garis air. *Docking* kapal harus dilakukan menurut ketentuan waktu tertentu dan secara rutin karena merupakan peraturan internasional yang mewajibkan adanya jadwal rutin untuk pemeriksaan berkala terhadap perlengkapan komponen bagian luar dari sistem penggerak, kondisi lambung di bawah garis air, dan perlengkapan penutup mesin. Jika terdapat permasalahan pada waktu pemeriksaan, maka permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan dilakukannya kegiatan *docking* kapal (Nugraha et al., 2018). Peraturan internasional yang mengharuskan dilakukannya *docking* kapal yaitu *Safety of Life at Sea (SOLAS) Chapter 2* tepatnya pada *Part E* regulasi 14. *International Safety Management Code (ISM Code)* pada elemen 10 juga merupakan dasar atau alasan dilakukannya pekerjaan *docking*.

Selain itu terdapat juga aturan atau dasar hukum yang mengatur pelaksanaan *docking* setiap kapal di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008, pada pasal 130 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa kapal beroperasi menuju galangan untuk melakukan perbaikan (*docking*) berdasarkan jadwal yang ditentukan sebagai kegiatan perawatan secara

berkala. Aturan tersebut menyebabkan semakin banyak perusahaan pelayaran membutuhkan galangan untuk melakukan perawatan dan perbaikan (Hidayat & Darmana, 2022).

Proses pelaksanaan *docking* kapal harus mempunyai perencanaan yang tepat dan matang dari berbagai pihak terutama perusahaan pemilik kapal ataupun operator kapal. Dalam proses perencanaan pihak pemilik kapal harus memberikan informasi kapal seperti *ship particular*, struktur kapal, daftar yang akan dilakukan perbaikan, jadwal atau rencana penyelesaian pekerjaan, *crewlist*, dan sebagainya. Serta terkait dengan dokumen, dalam proses perencanaan *docking* kapal yaitu dokumen *midship section*, dokumen *general arrangement*, *docking plan*, gambar konstruksi kapal, *capacity plan*, serta dokumen berat kosong kapal.

Kapal yang akan melaksanakan *docking* memerlukan perencanaan dalam waktu yang cukup lama karena perhitungan biaya yang dibutuhkan harus sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah disiapkan oleh perusahaan, serta pemilihan galangan kapal atau lokasi dilaksanakannya *docking* juga harus tepat dengan pertimbangan kelengkapan fasilitasnya, jangan sampai anggaran yang disiapkan tidak menyesuaikan dengan kondisi keuangan sehingga menyebabkan kesalahan dalam penentuan galangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah membuat daftar pekerjaan yang akan dilaksanakan, agar pada pelaksanaan pekerjaan nantinya tidak terjadi masalah kurangnya sumber daya manusia pada pelaksanaan *docking* dan dapat mengakibatkan bertambahnya waktu pelaksanaan *docking*.

Perusahaan atau operator kapal tempat penulis melaksanakan observasi yaitu PT. *Servewell Offshore*, berlokasi di Graha *Corner Stone*, Jl. Rajawali Selatan 2 No.1, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. PT. *Servewell Offshore* adalah perusahaan jasa maritim yang menyediakan kapal-kapal pendukung kegiatan lepas pantai. Perusahaan ini menyediakan armada, *crew*, serta menjadi operator kapal-kapal yang disewa oleh pen-*charter* untuk melaksanakan *project* atau melaksanakan pekerjaan pendukung pada anjungan-anjungan lepas pantai atau rig. Pihak manajemen kapal atau perusahaan yaitu PT. *Servewell Offshore* juga harus membuat perencanaan terkait penyediaan suku

cadang agar mencegah keterlambatan pengiriman suku cadang yang menyebabkan pekerjaan *docking* kapal menjadi tertunda. Penulis melakukan observasi terhadap salah satu kapal milik perusahaan yang melaksanakan *docking*. *Docking* yang dilaksanakan yaitu *Special Suvey* yaitu *docking* yang wajib dilakukan oleh kapal dalam kurun waktu lima tahun sekali.

Perusahaan telah mempersiapkan *schedule* dan *target docking*, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pekerjaan pada saat pelaksanaan *docking* serta menunjang tercapainya target-target pekerjaan. Untuk penetapan proses *docking* perusahaan telah menetapkan kepada divisi *maintenance* untuk bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan pencapaian pada pekerjaan *docking*, akan tetapi dari berbagai perencanaan yang telah disusun oleh perusahaan sebelum pelaksanaan pekerjaan *docking* kapal dimulai dalam pelaksanaannya di lapangan masih terjadi keterlambatan atau tertundanya penyelesaian pekerjaan serta tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Artinya jika pelaksanaan *docking* mengalami keterlambatan maka menyebabkan operasional kapal terganggu, sehingga dapat mempengaruhi pekerjaan pada proyek yang sedang dikerjakan oleh pen-*charter*. Berdasarkan uraian dan keadaan yang penulis temui di lapangan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan ingin mengemukakannya dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Komprehensif terhadap Keberhasilan Pelaksanaan *Docking* Kapal Milik PT. *Servewell Offshore*.”**

1.2. Batasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak meluas dan dalam pebahasannya lebih terfokus, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah yaitu hanya membahas :

1. Ketercapaian pelaksanaan *docking* berdasarkan perencanaan yang dilakukan sebelum pelaksanaan *docking* dilakukan.
2. Objek peneitian yang diambil yaitu proses pelaksanaan *docking* salah satu kapal milik PT. *Servewell Offshore* mulai dari tahap awal yaitu perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pelaksanaan.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah berdasarkan cakupan masalah di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana pengaruh perencanaan komprehensif terhadap keberhasilan pelaksanaan *docking*?
- 1.3.2. Seberapa besar pengaruh perencanaan komprehensif terhadap keberhasilan pelaksanaan *docking*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini antara lain :

- 1.4.1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan komprehensif terhadap keberhasilan pelaksanaan *docking*.
- 1.4.2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan komprehensif terhadap keberhasilan pelaksanaan *docking*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka terdapat beberapa manfaat penelitian bagi pembaca ataupun pihak yang lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Manfaat Teoritis
 1. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi Akademika Pelayaran dan khalayak umum khususnya dalam hal pengaruh perencanaan komprehensif terhadap keberhasilan pelaksanaan *docking*
 2. Sebagai informasi dan pengetahuan tambahan bagi para pembaca, termasuk instansi terkait dan diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan sumber daya manusia yang bergerak di bidang maritim.

3. Memberikan referensi dan masukan bagi penulis dalam penyusunan karya tulis ilmiah atau melanjutkan penelitian dengan menambahkan variabel.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan referensi dan masukan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan
2. Sebagai referensi untuk melakukan pengembangan PT. *Servewell Offshore* dalam berkiprah di dunia bisnis yang bergerak di bidang pen-*charter*-an kapal.